

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Suhesti Ningsih¹, Intan Indah Permatasari², Rukmini³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis/Akuntansi,
ITB AAS Indonesia

¹E-mail: hesti.hegi@gmail.com

²E-mail: intanindahpermatasari72@gmail.com

³E-mail: rukmini.stie.aas@gmail.com

Abstract

This research is a type of quantitative research aiming at determine the effect of economic growth, local revenue and general allocation funds on capital expenditure of all sub-districts of Karanganyar district from 2018 to 2022. The data used in this research are secondary data obtained from budget realization report and economic growth. Population in this research 17 sub-districts in Karanganyar regency. The sampling technique in this research used a saturated sampling technique. The sample in this research wa 17 sub-districts within 5 years so the sample is 85. The data analysis methods used are classical acceptance and multiple linear regression tests, F-tests, t-test and R²-tests. The results of the F-tests on the variables of economic growth, native local income, and general allocation funds influence government policies in allocating capital expenditures. The t-test results show that the variables economic growth and village income have a large effect on investment, while the general allocation fund has no effect on investment

Keywords: Economic growth, capital investment, general grants, local revenues

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Helmy, 2021). Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara

finansial. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerah.

Indikasi dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas serta pendapatan perkapita yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi ternyata

tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai. Belanja modal antara lain untuk Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi, jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman yang berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dengan adanya infrastruktur yang memadai mendorong investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan berpengaruh juga meningkatkan Belanja Modal (Ghozali, 2018).

Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekan pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No 32 Tahun 2004). Dengan demikian pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Jadi jika Dana Alokasi Umum meningkat maka akan diiringi dengan peningkatan Belanja Modal, mengingat dana

alokasi umum merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari APBN guna mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi, dkk (2022) yang menunjukkan dana alokasi ini berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi tidak dengan penelitian Alpi (2022).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonom, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018-2022.

1.2 Tinjauan Pustaka

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang harus dicapai selama 2023 yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam melakukan perannya sebagai pelaku ekonomi (UUD 1945 pasal 33).

b. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari hasil pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Alokasi Dana Umum

Alokasi Dana Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005).

d. Belanja Modal

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan

1.3 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menurun dalam jangka Panjang. Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indicator lain yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wertianti, dkk (2020) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari landasan teoritis dan temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerahnya, demikian pula dalam pengalokasian terhadap belanja yang dibutuhkan daerah. Apabila suatu daerah memiliki jumlah pendapatan yang lebih besar, maka pengalokasian dalam belanja

modal akan lebih besar. Oleh karna itu pemerintah akan mengoptimalkan belanja daerah agar tetap efektif dan efisien (Alfarizi, 2022). Jadi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal, hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan.

Setiap penyusunan APBD alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mempertimbangkan PAD yang diterima sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar- besarnya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Mundiroh (2019) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan

terhadap anggaran Belanja Modal. Secara teori jika dana alokasi umum meningkat maka diiringi belanja modal. Mengit dana alokasi umum merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dengan adanya DAU diharapkan Pemerintah Daerah yang mempunyai potensi Pendapatan Asli Daerah kecil dapat tetap membiayai kebutuhannya dan juga tetap dapat meningkatkan pelayanan publik melalui belanja modal. Dari uraian diatas sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penenlitian ini adalah 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Periode tahun yang diambil dalam penelitian ini mulai tahun 2018 sampai dengan 2022, sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 85

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2018), Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga jumlah sampel adalah 85.

Tabel 2.1

Daftar Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No	Nama Kecamatan	No	Nama Kecamatan
	Kecamatan		Kecamatan
1.	Colomadu	10.	Karangpandan
	Kecamatan		Kecamatan
2.	Gondangrejo	11.	Kebakkramat
3.	Kecamatan Jaten	12.	Kecamatan Kerjo
4.	Kecamatan Jatipuro	13.	Kecamatan Matesih

	Kecamatan		Kecamatan
5.	Jatiyoso	14.	Ngargoyoso
	Kecamatan		Kecamatan
6.	Kecamatan Jenawi	15.	Mojogedang
	Kecamatan		Kecamatan
7.	Jumapolo	16.	Tasikmadu
	Kecamatan		Kecamatan
8.	Jumantono	17.	Tawangmangu
	Kecamatan		
9.	Karanganyar		

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi(X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3). Sedangkan, variabel terikat pada penelitian ini adalah Belanja Modal (Y).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Data Sekunder adalah data dalam bentuk dokumen- dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS sebagai alat uji. Uji yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis meliputi analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R².

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menurut Sugiyono (2018), adalah teknik analisa data untuk menjelaskan data secara umum dengan menghitung nilai *minimum*, *maksimum*, *mean*, dan *standard deviation*.

Tabel 3.1
Deskriptif Statistik Data

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Deviasi
X1	85	-0,07	0,15	0,035	0,0581
X2	85	24000000	4,17	1,26	7,3998
X3	85	1,89	1,39	7,77	1,9112
Y	85	28806000	1,18	4,27	1,99
Valid N	85				

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Hasil uji menunjukkan nilai minimum variabel pertumbuhan ekonomi -0,07, maximum 0,15 dan mean 0,0346. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum 24000000,00, maximum 4,17 dan mean 1,26. Variable Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum 1,89, maximum 1,39 dan mean 7,77. Variable Belanja Modal memiliki nilai minimum 28806000,00, maximum 1,18 dan mean 4,27.

3.1.2 Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2018), jika nilai signifikansi *Kolmogorov* melebihi 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3.2

	X1	X2	X3	Y
N	85	85	85	85
Normal Mean	0,03	1,4831	9,1378	5,0200
Parame	46			
ters ^a	Std.	0,05	7,3998	1,9142
, ^b	Deviat	80	7	0
	ion	6		8
Most	Absolut	0,147	0,144	0,187
Extre	Positiv	0,129	0,144	0,187
me				0,231
Differen	Negati	-	-0,095	-0,121
ces	ve	0,147		-0,141

Kolmogorov-Smirnov Z	1,356	1,330	1,727	2,130
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,051	0,058	0,075	2,292

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 5%(0,05). Dapat diartikan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal dikarenakan nilai hasil uji lebih besar dari nilai taraf signifikansi yang digunakan.

Tabel

Hasil Uji Multikolinearitas

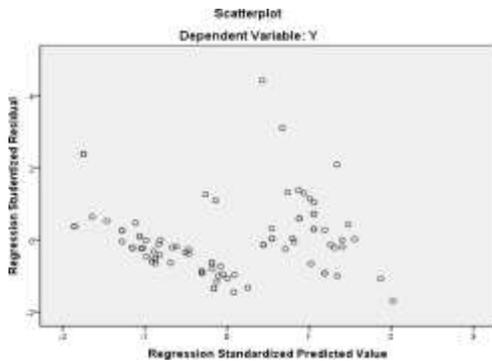
Model	Tolera n	VI F	Keterangan
(Constant)			Bebas
XA	0,984	1,02	Multikolinearitas Bebas
X2	0,96	1,04	Multikolinearitas Bebas
X2	0,95	1,05	Multikolinearitas Bebas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai VIF dari ketiga variabel kurang dari 10, dan nilai *tolerance* setiap variabel lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa, model regresi terhindar dari multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Hasil Uji heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik scatterplot menunjukkan hasil berupa titik-titik yang menyebar tidak hanya diatas dan dibawah atau disekitar 0 (nol) saja serta tidak membentuk pola tertentu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastis.

3.1.3 Uji Hipotesis

Tabel 3.5 Hasil uji Hipotesis

Variabel	Parameter	Tanda Harapan	Hasil Regresi Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Konstanta	a	+/-	4,541		
Pertumbuhan Ekonomi(X1)	β_1	+	2,118	0,000	Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah (X2)	β_2	+	0,055	0,014	Berpengaruh
Dana Alokasi Umum (X3)	β_3	+	-0,012	0,175	Tidak Berpengaruh
R-Square				0,479	
Adj R-Square				0,459	
F-Statistik Probability				0,000	Layak

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Ghozali (2018), merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen).

Berdasarkan hasil uji, didapat

c. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi menurut Ghozali (2018), data yang baik merupakan data yang tidak terjadi autokorelasi. Data tidak terjadi autokorelasi jika nilai $du < DW < 4-du$.

Tabel 3.4

Hasil uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	DU	Keterangan
1	1,884	1,72	Bebas autokorelasi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Dari tabel diatas, nilai Durbin-Watson (DW) 1,884, lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,7210 dan kurang dari (4-du) $4 - 1,7210 = 2,279$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan tidak memiliki gejala autokorelasi.

persamaan regresi linear berganda, dengan model regresi sebagai berikut: $Y = 4,541 + 2,118X_1 + 0,055X_2 - 0,012X_3 + e$

Bentuk persamaan atas regresi diatas dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta (nilai mutlak Y) memiliki nilai sebesar 4,541,

artinya jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai dari Belanja Modal adalah 4,541.

- 2) Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai sebesar 2,118, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan pada pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 2,118.
- 3) Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,055 artinya setiap kenaikan 1 satuan pendapatan asli daerah akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,055.
- 4) Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,012, artinya setiap kenaikan 1 satuan dana alokasi umum akan terjadi penurunan Belanja Modal sebesar 0,012.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ferdinand (2014), Uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel yang digunakan mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Model regresi yang layak adalah model regresi yang nilai sig. < 0,05.

c. Uji t

Uji ini menurut Ghozali (2018), pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel – variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai sig. <

0,05 dan thitung > ttabel yang dapat diartikan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Setelah proses analisa, didapatkan nilai thitung (7,640) > ttabel (1,662) dan sig. (0,000) < 0,05 maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dapat diartikan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
 - 2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Setelah proses analisa, didapatkan nilai thitung (2,501) > ttabel (1,662) dan sig. (0,000) < 0,05 maka H2 diterima dan Ho ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
 - 3) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Setelah proses analisa, didapatkan nilai thitung (-1,368) < ttabel (1,662) dan sig. (0,000) > 0,05 maka H3 ditolak dan Ho diterima. Disimpulkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi menurut Ghozali (2018), bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini mensyaratkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh Adjusted R Square 0,459.

Nilai tersebut setara dengan 45,9%. Hal ini berarti variable independent berpengaruh terhadap variable dependen dalam penelitian ini sebesar 45,9%. Sisanya 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

3.2. Pembahasan

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung (7,640) > ttabel (1,662) dan sig. (0,000) < 0,05.

Hal ini terjadi dikarenakan semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka peran pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang akan lebih dipertimbangkan kembali. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi berdampak pada permintaan pasar yang kuat. Tentunya permintaan pasar yang kuat akan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan melakukan belanja modal. Pemerintah akan menginvestasikan dalam aset fisik, seperti infrastruktur, mesin, peralatan dan bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh Alpi (2022), bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung (2,501) > ttabel (1,662) dan sig. (0,000) < 0,05.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi memberikan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang lebih besar untuk dialokasikan ke Belanja Modal. Dengan pendapatan asli daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat mengalokasikan Sebagian dari pendapatan tersebut untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah lewat pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfari, dkk (2022), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Setelah proses analisa, didapati nilai thitung (-1,368) < ttabel (1,662) dan sig. (0,000) > 0,05.

Semakin besar DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar pula potensi untuk meningkatkan Belanja Modal. Dana Alokasi Umum yang cukup besar dapat memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah

untuk mengalokasikan dana ke Belanja Modal. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah DAU mengalami penurunan nilai dikarenakan imbas dari infeksi virus covid-19 yang berdampak pada pengalihan sumber lain dalam pembiayaan operasional pemerintah daerah

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi, dkk (2022), bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpi (2022), bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan analisa data penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018- 2022. Hal ini berarti pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan perkapita yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah daerah mengoptimalkan belanja daerah untuk membangun sarana dan prasarana daerah guna melancarkan kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah DAU mengalami penurunan nilai dikarenakan imbas dari infeksi virus covid-19 yang berdampak pada

pengalihan sumber lain dalam pembiayaan operasional pemerintah daerah.

5. REFERENSI

- Asraf. (2019). The Effect Of Regional Original Income (Pad) And General Allocation Funds (Dau) On Capital Goods Expenditure In West Pasaman. *E-jurnal apresiasi ekonomi*, Vol. 7(I).
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Ilmu Manajemen Edisi 5*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Firza Alpi M & Febrian Sirait Rio (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol, 23(I).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Helmy. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia periode 2015-2019. *JEA*, Vol. 3(II)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. ANDI: Yogyakarta
- Mundirah Siti. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

- Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *JABI*, Vol. 2(I)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang “Bagan Akun Standar”
- Pemerintah Pusat. No. 55. (2005). Peraturan Permerintah (PP) tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun (2000). tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- PP No. 24 Tahun 2005 Tentang “Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)”
- Putri, Erina Setiana (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020). *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Renaldi Alfarizi M, Pratomo Budi. (2022). The Influence Of Economic Growth, Regional Origin Income, General Funds On Capital Expenditure Budget Allocation (Comparative Study Of City/Regency Governments In West Java Province Conditions Before And During The 2019 And 2020 Covid-19 Period). *e-Proceeding of Management*, Vol. 9(II).
- Syukri Muhammad, Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA*, Vol. 2(II).
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah”
- Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akutansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3(II)
- Wertianti. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E- Jurnal Akutansi Universitas Udayana*. Vol. 4(III)